

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Priska Karolina Dhiu**

*karlyndhiu@gmail.com*

**Nur Handayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### **ABSTRACT**

*This research aimed to examine and analyze the effect of taxpayers' awareness, tax knowledge, and tax-incentive policy on the compliance of motor vehicle tax at the regional revenue service of East Nusa Tenggara Province in the Nagekeo sub-district. The research was quantitative with questionnaires as the instrument. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling. The population was all taxpayers listed on the Regional Revenue Service of East Nusa Tenggara Province in the Nagekeo sub-district. Moreover, there were 100 taxpayers as the sample. The data analysis technique used multiple linear regression with a hypothesis test. The result showed that taxpayers' awareness had an insignificant negative effect on compliance of motor vehicle tax. However, both tax knowledge and tax-incentive policy had a significantly positive effect on compliance of motor vehicle tax. Additionally, taxpayers' awareness had to be increased, especially increasing tax knowledge regarding tax provisions and procedures, tax systems and tax functions. In addition, taxpayers needed to be aware of the importance of tax so that they were obliged to pay motor vehicle tax.*

*Keywords: taxpayers' awareness, tax knowledge, tax incentive policy, taxpayers' compliance*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kusioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *accidental sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Nagekeo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Nagekeo. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dari wajib pajak harus ditingkatkan. Terutama meningkatkan pengetahuan perpajakan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, sistem pajak dan fungsi pajak. Agar wajib pajak sadar akan pentingnya pajak sehingga wajib pajak menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yaitu dengan membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kebijakan insentif pajak, kepatuhan wajib pajak

### **PENDAHULUAN**

Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota guna penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam mengelola kekayaan daerah dan penggunaan belanja daerahnya masing-masing. Menurut Mahaputri dan Noviari (2016)

Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang relevan guna membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, harmonis dan bertanggungjawab Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan juga digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan undang-undang terdapat beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diperoleh dari pemungutan pajak setiap pemilik kendaraan bermotor yang berprofesi di jalanan umum. Banyaknya kebutuhan yang memerlukan alat transportasi mengakibatkan seluruh lapisan masyarakat dari yang menengah kebawah sampai menengah ke atas harus memiliki alat transportasi paling tidak kendaraan bermotor. Karena dengan adanya alat transportasi seperti kendaraan bermotor dapat meningkatkan daya beli yang sangat melonjak dan tentunya hal tersebut dapat membuat semakin meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, maka dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena adanya peningkatan jumlah pajak yang akan diterima.

Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan salah satu pajak provinsi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor berlaku bagi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan baik roda dua maupun roda empat (Prasetyo, 2020). Pajak kendaraan bermotor dapat dibayar melalui kantor Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan salah satu kantor yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak (Habut, 2021). Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Namun pada realisasinya, banyak wajib pajak kendaraan bermotor dimana mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting, karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakkan, dan pelalaian pajak sehingga pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pembangunan suatu daerah. Agusti dan Herawaty (2009) menyatakan bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui apa fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak. Menurut keputusan kementerian keuangan No: 544/KMK.04/200, dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam persatuan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo masih dikatakan sangat rendah, hal tersebut diakibatkan oleh tunggakan pajak yang terbilang masih sangat banyak. Data tunggakan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kecamatan**  
**Periode Desember 2022**

Kecamatan	Plat Hitam (Rp)	Plat Merah (Rp)	Plat Kuning (Rp)
Aesesa	7,015,422,304	264,196,700	946,812,500
Aesesa Selatan	294,230,700	4,759,000	28,299,000
Boawae	3,567,057,950	9,617,500	379,082,000
Mauponggo	2,077,517,700	7,141,000	316,277,300
Nangaroro	1,046,395,600	6,158,500	240,829,600
Keo Tengah	858,314,600	8,218,500	72,628,750
Wolowae	437,853,300	5,202,000	69,563,900
<b>TOTAL</b>	<b>15,296,792,154</b>	<b>305,293,200</b>	<b>2,053,493,050</b>

Sumber: Data Sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kab. Nagekeo, 2022

Dilihat dari data-data pada tabel diatas, dijelaskan bahwa selama periode 2022 terdapat banyak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Nagekeo. Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang sangat banyak untuk plat hitam adalah kecamatan Aesesa yaitu sebesar Rp 7.015.422.304, untuk plat merah tunggakan pajak kendaraan bermotor paling banyak adalah kecamatan Aesesa yaitu sebesar Rp 264.196.700 dan tunggakan pajak kendaraan bermotor paling banyak untuk plat kuning adalah kecamatan Aesesa sebesar Rp 964.812.500.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pemungutan pajak yang tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak, ketidakpuasan publik akan pelayanan publik, pembanguna infrastruktur yang tidak merata serta kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Jika wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibanya maka pendapatan pajak juga akan meningkat dan pemerintah dapat menjalankan peranya. Kemauan membayar pajak harus dimiliki oleh wajib pajak agar penerimaan pajak mencapai hasil yang maksimal. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kebijakan insentif pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan insentif pajak sebagai variabel independent. Pada penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian Dewi *et al.* (2020) dengan hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yunita *et al.* (2017) menunjukkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Rusmayani dan Supadmin (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Kadir *et al.* (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan samsat, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kebijakan intensif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini berdeda dengan penelitian lainnya, karena hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sehingga peneliti merasa pentingnya penelitian ini dan layak untuk diteliti.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat suatu penelitian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi menjelaskan tingkah laku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (Kesadaran wajib pajak) dan atribusi eksternal ( pengetahuan pajak dan kebijakan intensif pajak) yang merubah sikap seseorang, yaitu untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Atribusi eksternal merupakan kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang. Sedangkan atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh kendali individu itu sendiri.

### Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kebijakan intensif pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Jika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Lidawati dan Hamta, 2016).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin (Sartika *et al.*, 2021). Menurut Rumiya (2017) kepatuhan wajib pajak ialah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### Pengetahuan Pajak

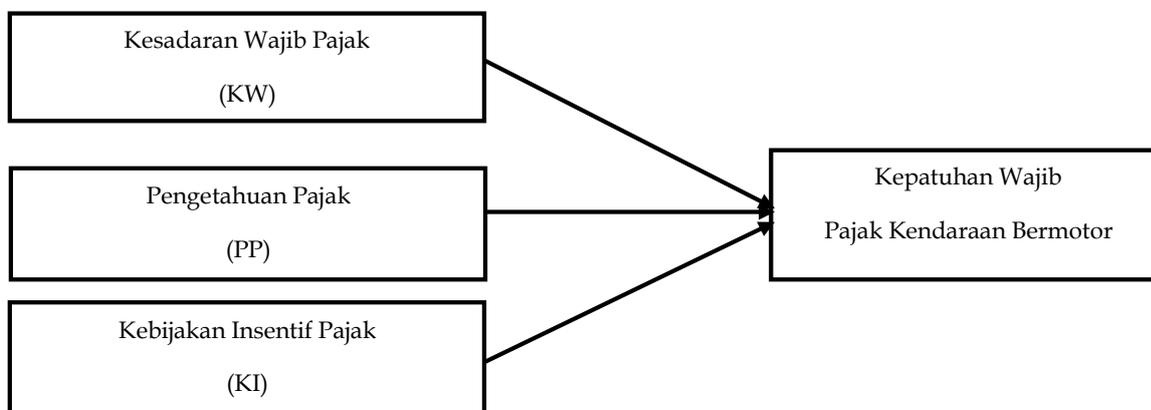
Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menempuh arah strategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, apabila pengetahuan dan pemahaman perpajakan seorang wajib pajak tinggi, maka wajib pajak akan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak, sebaliknya apabila pengetahuan pajak seorang wajib pajak rendah maka wajib pajak tidak akan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pajak.

## Kebijakan Intensif Pajak Kendaraan Bermotor

Intensif pajak adalah upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aprilianti (2020) berpendapat bahwa pemerintah memberikan intensif pajak dengan tujuan yaitu untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada investor agar menarik minat para investor serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak.

## Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1  
Model Penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengembangan Hipotesis

### Pengaruh Kesadaran Pajak Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mempunyai dua bentuk yaitu yang pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan terbesar negara. Penelitian Kowel *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela membayar pajaknya dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan landasan awal bagi wajib pajak dalam menentukan sikap untuk membayar atau menghindari pajak. Pengetahuan pajak adalah sebuah informasi yang didasarkan pada pengetahuan serta wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak melalui cara pendidikan, pelatihan, serta seminar yang diadakan oleh pihak terkait. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki tingkat pengetahuan mengenai praturan perpajakan akan semakin luas dan lebih memahami manfaat membayar pajak dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibuktikan dari penelitian yang dilakukan Dewi *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_2$ : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **Pengaruh Kebijakan Intensif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dinamakan intensif pajak. Menurut Apsari (2012) Intensif pajak adalah fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan. Pengaruh kebijakan intensif terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan Alfina dan Diana (2021) maupun Sartika *et al.* (2021) yang menunjukkan intensif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3$ : Kebijakan Intensif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Untuk mengukur pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kebijakan intensif pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Sugiyono (2014:14) mengemukakan bahwa data kuantitatif merupakan data yang tersedia dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan serta diukur menggunakan satuan hitung, atau data kuantitatif yaitu data-data kualitatif yang diubah kedalam bentuk angka (diangkakan).

#### **Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Sugiono (2014:16) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek. Populasi (objek) dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dan terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo.

#### **Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *accidental sampling*. Sampling kebetulan (*accidental sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan karena kebetulan, sehingga subjek yang diperoleh merupakan subjek yang secara kebetulan berinteraksi dengan peneliti dan memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai sampel serta dapat menjadi sumber data yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Penentuan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus *slovin*. . Rumus *Slovin* adalah:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : sampel

N : jumlah populasi

e : persen kesalahan pengambilan sampel, peneliti mengestimasi nilai toleransi kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 10%.

Berdasarkan rumus *slovin* di atas jumlah populasi sebanyak 21.271 maka banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebanyak

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{21.271}{1 + 21.271(0,1)^2}$$

$$n = \frac{21.271}{213,71}$$

$$n = 99,53$$

Jadi nilai n adalah 99,53 atau dibulatkan menjadi 100

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari responden melalui kusioner. Kusioner yang telah disiapkan oleh peneliti akan disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo. Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung atau dapat dikatakan bahwa data sekunder didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo.

### **Variabel dan Defenisi Operasional Variabel**

Menurut Darmawan (2013) Variable penelitian adalah segala sesuatu yang bisa berwujud apa saja yang dapat ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga dapat memperoleh suatu informasi penting yang kemudian dapat disimpulkan.

### **Variabel Independen (Bebas)**

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atau kewajibannya untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya meningkat.

#### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak telah memahami mengenai peraturan perpajakan dan memahami bagaimana dampak yang dihasilkan jika bertindak taat atau lalai pajak. Dengan pengetahuan pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat.

### **Kebijakan Intensif Pajak Kendaraan Bermotor**

Insentif pajak merupakan pengeluaran pemerintah tidak langsung, melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara serta dalam pemberian insentif, aspek administratif dari pemanfaatan implementasi harus mudah dan andal.

### **Variabel Dependen (Terikat)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Wardani (2017) Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu

dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Kualitas Data**

##### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kusioner tersebut. Suatu kusioner dapat dikatakan valid jika suatu pernyataan yang ada pada kusioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kusioner tersebut. Pertanyaan yang terdapat pada kusioner dapat diakui valid jika memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diukur dalam kusioner tersebut (Ghozali, 2018:45).

##### **Uji Reliabilitas**

Merupakan sebuah teknik analisis data untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diberikan responden dapat dipercaya. Uji realibilitas ini dapat digunakan untuk membantu mencari informasi mengenai konsistensi atau kestabilan jawaban yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang sudah diberikan oleh peneliti. Jika jawaban responden dari pertanyaan kusioner mengalami tingkat kestabilan yang sama seiring berjalanya waktu maka jawaban responden tersebut dapat dikatakan reliable dan handal (Ghozali, 2018:20). Teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ ) > 0,60 maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliable.

##### **Uji Asumsi Klasik**

###### **Uji Normalitas**

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Model dengan sifat mendekati nol dan pendistribusianya normal maka dapat dikatakan model regresi baik (Ghozali, 2018:17). Pada pengujian ini dengan menggunakan uji *kolmogorov-Smirnov* (KS), pada pengujian normalitas dengan menggunakan *kolmogorov-Smirnov* ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya >0,05 maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal. Sedangkan apabila pendekatan tersebut menunjukkan signifikan <0,05 dapat dipastikan residual dapat mengalami distribusi abnormal.

###### **Uji Multikolineritas**

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji atau tidaknya suatu kolerasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik ialah tidal mempunyai korelasi antar variabel independen atau tidak dapat terjadi multikolineritas. Agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut terjadi atau tidak maka dapat dideteksi menggunakan cara nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Menurut Ghozali (2016) Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolineritas jika suatu nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ( $10(\geq 0,10)$ ) dan VIF lebih kecil dari 10 ( $\leq 10$ ).

###### **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Jika varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau model regresi yang baik dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas atau model regresi yang tidak baik. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukian dengan menggunakan uji statistik *chart scatter plot*. Ghozali (2018:38) menyatakan ada beberapa ketentuan dalam mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu penelitian dikatakan heteroskedastisitas jika hasil dari metode

grafik memebentuk pola tetentu, dan terdapat titik-titik yang teratur dan tersebar di antara angka 0 dan sumbu Y, sebaliknya penelitian dikatakan tidak heteroskedastisitas apabila hasil metode grafik tidak menunjukkan pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis linear berganda adalah menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Tujuan analisis dari regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Maka, model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KW + \beta_2 PP + \beta_3 KI + e$$

Keterangan :

$\alpha$	: Konstanta
KWP	: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: Koefesien Regresi
KW	: Kesadaran Wajib Pajak
PP	: Pengetahuan Pajak
KI	: Kebijakan Intensif Pajak

### **Uji Kelayakan Model ( Uji F )**

Uji F memiliki tujuan untuk menentukan apakah data tersebut layak serta untuk menguji apakah semua variabel independen pada model memiliki suatu pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F memiliki kriteria pengujian tersendiri, yaitu: Apabila nilai sig < 0,05, maka hipotesis dapat diterima yang membuktikan bahwa variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan layak digunakan. Apabila nilai sig > 0,05, maka hipotesis ditolak yang mengakibatkan bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan tidak layak digunakan.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi tersebut (Ghozali, 2016). Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati satu maka yang terjadi kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik atau juga bisa dikatakan layak. Maka sebaiknya jika nilai  $R^2$  mendekati nol maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen kurang baik atau bisa dikatakan tidak baik.

### **Uji Hipotesis ( Uji t )**

Uji t berguna untuk mengetahui apakah variabel independen dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Suatu variabel independen dapat secara individual dan signifikan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian uji t dalam penelitian ini yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% sesuai dengan  $\alpha$  (asumsi taraf nyata 0,05) yang telah ditentukan sebelumnya maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan. Kriteria pengujian ini adalah sebagai berikut: Apabila nilai sig < 0,05, maka kesimpulannya hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen dapat memberikan pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig > 0,05, maka kesimpulannya hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

#### Hasil Uji Validitas

Uji validasi dalam penelitian ini menggunakan analisis item yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. seluruh item pernyataan yang mengukur variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kebijakan insentif dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang disajikan oleh peneliti adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang telah diberikan. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ )  $> 0,60$ . Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan menunjukkan bahwa setiap variabel yang ada menghasilkan data yang reliabel. Dikatakan reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ )  $> 0,60$ . Dan setiap variabel tersebut memiliki nilai *Alpha Cronbach* masing-masing yaitu kesadaran wajib pajak 0,758, pengetahuan pajak 0,767, kebijakan insentif pajak 0,789, dan kepatuhan wajib pajak 0,771.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Untuk menguji kehandalan hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ( $\text{Sig} \geq 0,05$ ).

##### Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui suatu model regresi apakah mengalami gejala multikolinieritas dapat dilihat menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF kurang dari 10 ( $\text{VIF} < 10$ ). Berikut hasil uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2  
Hasil Uji Multikolinieritas  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,644	1,553
Pengetahuan Pajak	0,513	1,950
Kebijakan Intensif Pajak	0,619	1,616

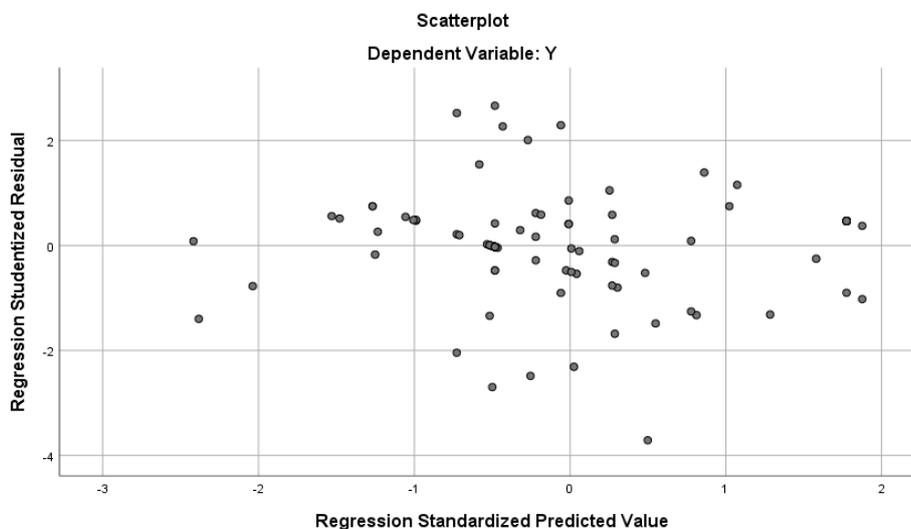
Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel 2, nilai VIF pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kebijakan insentif dan kepatuhan wajib pajak masing-masing sebesar 1,553; 1,950; dan 1,616. Nilai VIF ketiga variabel yang ada pada tabel memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai VIF yang ditentukan ( $1,553 < 10$ ;  $1,950 < 10$ ;  $1,616 < 10$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki *variance inflation factor* (VIF) diatas 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa antarvariabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

Untuk melihat gejala multikolinieritas juga dapat dilihat pada nilai *tolerance*. Apabila hasil perhitungan nilai *tolerance* mendekati angka 1 (satu), maka model tersebut bebas dari gejala multikolinieritas. Apabila hasil perhitungan nilai *tolerance* menjauh angka 1 (satu), maka model tersebut terindikasi memiliki gejala multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel 2, nilai *tolerance* pada variable kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kebijakan insentif dan kepatuhan wajib pajak masing-masing sebesar 0,644; 0,513; dan 0,619. Nilai *tolerance* ketiga variabel pada tabel memiliki nilai yang mendekati nilai *tolerance* yang ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terindikasi adanya gejala multikolinieritas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam melihat deteksi ada atau tidaknya dapat dilihat menggunakan metode *scatter plot*. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, meleber, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam gambar 2



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber : Data Primer Diolah, 2023**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada gambar 2, grafik *scatterplot* menunjukkan data tersebut tersebar diatas dan dibawah koordinat 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat pola yang terbentuk secara jelas pada penyebarannya. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tidak terjad heteroskedastisitas. Pada gambar 2 juga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini bebas dari asumsi klasik tersebut. Sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda bertujuan untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel atau lebih. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kebijakan insentif. sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut uji regresi berganda yang disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.551	.326		1.691	.094
KW	-.037	.111	-.030	-.331	.741
PP	.476	.118	.410	4.034	.000
KI	.380	.090	.392	4.232	.000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang disajikan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 KW + \beta_2 PP + \beta_3 KI + e$$

$$KWP = 0,551 - 0,037KW + 0,476PP + 0,380KI + e$$

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahui besaran koefisien determinasi dengan melihat kolom R<sup>2</sup> hasil dari analisa data SPSS. Berikut uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Rsquare	Adjusted Rsquare	Std. Error of the Estimate
1	.701 <sup>a</sup>	.492	.476	.37498

a. Predictor: (Constant), KW, PP, KI

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Nilai R digunakan untuk melihat apakah variabel independen yang digunakan memiliki hubungan yang kuat atau lemah terhadap variabel dependen. Apabila nilai R tabel mendekati angka 1, maka variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang kuat. Nilai R pada uji koefisien determinasi sebesar 0,701 sehingga dapat diartikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kebijakan insentif memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan digunakan untuk Pengukuran uji F dalam menguji signifikansi pengaruh pada jenis penelitian yang sesuai. Pengukuran uji F menggunakan angka signifikan sebesar 5% (0,05). saat nilai signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan layak digunakan, sebaliknya apabila nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan tidak layak digunakan. Nilai uji F terdapat dalam *output* ANOVA. Berikut uji F yang disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.051	3	4.350	30.939	.000 <sup>b</sup>
	Residual	13.499	96	.141		
	Total	26.550	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), KW, PP, KI

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji kelayakan model yang disajikan pada tabel 5, besar nilai  $F_{hitung}$  sebesar 30,939 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian nilai sig lebih kecil dari batas nilai signifikan ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kebijakan insentif secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dan layak digunakan.

### Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh informasi apakah masing-masing variabel bebas kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kebijakan intensif pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengukuran uji t menggunakan angka signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan ketentuan yaitu, jika nilai signifikan < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya variabel independen atau bebas dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut uji t yang disajikan pada tabel 6.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji T)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.551	.326		1.691	.094
Kesadaran Wajib Pajak	-.037	.111	-.030	-.331	.741
Pengetahuan Pajak	.476	.118	.410	4.034	.000
Kebijakan Intensif	.380	.090	.392	4.232	.000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang disajikan pada tabel 6, adapun penjelasan dari masing-masing hipotesis yang disusun. antara lain : (1) Hasil uji hipotesis pertama adalah menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel 6, diperoleh besaran nilai  $\beta$  variabel independen kesadaran wajib pajak (KW) sebesar -0,037 dan nilai Sig. sebesar 0,741. Apabila nilai  $\beta$  memiliki nilai positif menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai  $\beta$  memiliki nilai negatif menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian nilai  $\beta$  variabel kesadaran wajib pajak bernilai negatif dan nilai signifikannya lebih besar dari batas nilai signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis  $H_1$  ditolak.

(2) Hasil uji hipotesis kedua adalah menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel 6, diperoleh besaran nilai  $\beta$  variabel independen pengetahuan pajak (PP) sebesar 0,476 dan nilai sig. sebesar 0,000. Apabila nilai  $\beta$  memiliki nilai positif menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai  $\beta$  memiliki nilai negatif menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian nilai  $\beta$  variabel pengetahuan pajak bernilai positif dan nilai signifikannya lebih kecil dari batas nilai signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis  $H_2$  diterima. (3) Hasil uji hipotesis ketiga adalah menguji pengaruh kebijakan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel 6, diperoleh besaran nilai  $\beta$  variabel independen kebijakan insentif (KI) sebesar 0,380 dan nilai sig. sebesar 0,000. Apabila nilai  $\beta$  memiliki nilai positif menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai  $\beta$  memiliki nilai negatif menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian nilai  $\beta$  variabel kebijakan insentif bernilai positif dan nilai signifikannya lebih kecil dari batas nilai signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan insentif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis  $H_3$  diterima.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian pertama menjelaskan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga  $H_1$  ditolak. Pada dasarnya tiap individu memiliki sifat sadar dalam dirinya. Sadar merupakan sifat dalam manusia yang mampu mengetahui emosi yang dirasakan sehingga mengerti tentang kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai yang dialami pribadi maupun orang lain. Seseorang yang memiliki kesadaran yang baik mampu membaca situasi sosial, memahami orang lain, dan mengerti harapan orang lain terhadap dirinya sendiri sehingga mampu merefleksi diri, mengamati dan menggali pengalaman. Sama halnya dengan pajak, seorang wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pentingnya pajak di Indonesia. Sehingga pajak yang disusun untuk pembangunan negara dapat berjalan dengan maksimal.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian kedua menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak bernilai positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga  $H_2$  diterima. Pengetahuan merupakan rahmat Tuhan kepada setiap individu untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Pengetahuan merupakan landasan manusia dalam menentukan arah jalan yang dipilihnya. Selain itu, pengetahuan juga adalah pondasi bagi dirinya dalam memutuskan sesuatu. Tanpa adanya pengetahuan, manusia tidak mampu menjalani kehidupannya sehari-hari. Sama halnya dengan pengetahuan pajak, pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang berlandaskan pada ilmu dan wawasan yang dimiliki tentang pajak melalui tingkat Pendidikan, pelatihan yang dilakukan, serta seminar pajak yang diikuti oleh pihak terkait. Apabila seorang wajib pajak memiliki ilmu yang luas seperti peraturan pajak yang ditetapkan, perhitungan pajak yang ditentukan, arah tujuan pajak, serta yang lainnya maka seorang wajib pajak akan mengikuti semua arahan dan menghindari larangan yang telah ditentukan sebagai wajib pajak khususnya kendaraan bermotor.

## **Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian ketiga menjelaskan tentang pengaruh kebijakan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa kebijakan insentif bernilai positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga  $H_3$  diterima. Setiap individu akan senang apabila mendapatkan sesuatu yang lebih atau insentif terhadap kebijakan yang diberikan baik dari perusahaan, pemerintah, maupun tempat lain yang membuat kebijakan tersebut. Insentif merupakan sebuah penambahan pemasukan yang didapatkan pekerja atas tindakan yang dilakukan. Manfaat adanya insentif yaitu sebagai peningkatan motivasi untuk kerja, adanya rasa dihargai, dan lainnya. Sama halnya dengan insentif pajak, insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian, tarif pajak preferensial, kredit, atau penangguhan kewajiban pajak. Tujuan adanya insentif pajak yaitu menarik perhatian investor dalam rangka mendorong dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Macam-macam insentif pajak yang diberikan antara lain pengurangan tarif pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, dan penangguhan pajak. Dari beberapa macam-macam insentif pajak sebagai salah satu langkah untuk menarik perhatian wajib pajak untuk rutin membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut memiliki makna bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat yang rendah. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. (2) Hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini disebabkan oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak yang memiliki ilmu pajak yang lebih akan digunakan sebagai suatu pertimbangan keputusan yang baik pada dirinya sendiri. Keputusan yang baik menjadi pertimbangan bagi seorang wajib pajak akan berdampak pada kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yang taat akan aturan yang ditentukan. (3) Hasil penelitian ini menyatakan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### **Keterbatasan**

Dalam proses penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya (1) Pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kebijakan insentif pajak) untuk menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah terbatas. (2) Karena ada keterbatasan jarak dan waktu maka peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak dari populasi pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Nagekeo. Pada saat penyebaran kuesioner peneliti merasa cukup kesulitan untuk melakukan penelitian karena banyak para wajib pajak yang menolak untuk menjadi responden. (3) Peneliti merasa kesukesan saat melakukan perijinan penelitian dan pada saat pengambilan data sekunder pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Nagekeo. Data yang dibutuhkan tidak tersedia oleh petugas, sehingga penelitian ini sedikit tersendat.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian terkait kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kebijakan intensif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya yaitu: (1) Peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitian seperti menambah variabel-variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan wawancara secara langsung dan tidak hanya menyebarkan kuisioner, sehingga peneliti dapat memperhatikan secara langsung tanggapan dari masing-masing responden dalam memberikan jawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, A. F. dan Herwanty. 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Alfina, Z. dan I. Diana. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jurnal Riset Akuntansi* 10 (4).
- Aprilianti, A. A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E- Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1 (1): 1-20.
- Apsari, N. D. D. 2012. Pengaruh Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Surabaya Barat. *Jurnal Akuntansi UNESA* 1 (1).
- Arfamaini, R. dan A. K. Susanto. 2021. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi* 5 (1).
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dewi, I. A. P. P., G. A. P. Yudiantara, dan N. P. Yasa. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 11 (3).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi ke 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Habut, M.T.2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Kadir, M. I. S., T. Runtu. dan W. Pontoh. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9 (2): 774-784.
- Lindawati, dan Firdaus Hamta. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Batam), 3(1), 1-18.
- Mahaputri, N.N.T. dan N. Noviari. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 17(3):2321-2351.

- Prasetyo, Eko. 2020. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor: Studi pada Kantor Bersama Samsat Kab Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 6 (2).
- Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Rusmayani, L. M. N. dan N. L. Supadmin. 2017. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 20 (1): 173-201.
- Sartika, E. D., N. Afifah, S. N. Sari. 2021. Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Codid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan* 5 (2): 144-159.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Ke-24. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yunita, S. P., P. S. Kurniawan. dan P. G. 2017. Diatmika. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Ganesha* 8 (2).
- Wardani, D. K. dan Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 5 (1): 15.